

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN USAHA HUTAN
TANAMAN RAKYAT DI DESA BACU-BACU
KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ARINI PUSPITA LESTARI

M 111 08 019



**JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Potensi Pengembangan Usaha Hutan
Tanaman Rakyat di Desa Bacu Kecamatan
Pujananting Kabupaten Barru Provinsi
Sulawesi Selatan

Nama : Arini Puspita Lestari

NIM : M 111 08 019

Jurusan : Kehutanan

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan

Pada
Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Ir. M.Asar. Said Mahbub, M.P
NIP.19681107199603 1 001

Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**

Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc.
NIP. 19540418197903 1 001

ABSTRAK

Arini Puspita Lestari (M 111 08 019) : Analisis Potensi Pengembangan Usaha Hutan Tanaman Rakyat Di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, Di bawah Bimbingan M. Asar Said Mahbub dan Muhammad Alif.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap kelompok tani hutan dalam pengembangan sumberdaya dan produk potensial, menentukan tujuan keuangan unit rumah tangga kelompok tani hutan, dan menganalisis sumberdaya/produk yang potensial untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada Bulan Desember 2011 hingga Januari 2012. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan responden. Data sekunder diperoleh dari laporan instansi pemerintah data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, analisis tujuan keuangan dan analisis pengembangan empat bidang usaha.

Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi unit usaha masyarakat disekitar/diluar areal HTR. Analisis tujuan keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis livelihood. Analisis livelihood digunakan untuk mengetahui berapa yang harus diperoleh petani untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya. Untuk menganalisis produk dan sumberdaya pada unit usaha yang potensial maka dilakukan dengan metode analisis empat bidang pengembangan usaha yang meliputi pasar dan ekonomi, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, sosial dan kelembagaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa unit usaha yang mengelola produk yang cukup potensial untuk dikembangkan di areal HTR adalah kacang tanah, jabon, mahoni, sengon, dan akasia. Sedangkan tujuan keuangan kelompok tani hutan adalah subsisten. Dimana masyarakat membutuhkan Rp. 3.555.278,-/tahun/responden untuk memenuhi kebutuhan layak sehari-harinya. Unit usaha untuk produk yang paling potensial pada areal HTR untuk kriteria empat bidang pengembangan usaha adalah jabon sebagai tanaman pokok dan kacang tanah sebagai tanaman musiman.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Rimba !!

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan IlmuNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Sang Pembaharu Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini diselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materil. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan sembah sujud dan hormat penulis kepada Ibunda tercinta **Wiwi Supiatin** dan Ayahanda **Drs. H. Husaeni** atas kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan, dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Allah Yang Maha Pengasih, senantiasa memberikan Kasih Sayang-Nya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Ir. M. Asar Said Mahbub, M.P** dan Bapak **Muhammad Alif, K.S, S.Hut., M.Si** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P**, Bapak **Dr. Ir. H. Anwar Umar, M.S** dan Bapak **Dr. Ir. Suhasman, M.Si** selaku dosen penguji, terima kasih atas saran, kritik, koreksi dan kesediaan waktunya.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P.**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Musrizal Mu'in, M.Sc.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, M.P.**, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bapak **Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc.**, selaku Ketua Jurusan Kehutanan.
4. Bapak **Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si** dan Bapak **Muhammad Alif, K.S, S.Hut., M.Si.** selaku Penasehat Akademik (PA) dan **Seluruh Dosen Pengajar** beserta **Staf Administrasi Fakultas Kehutanan Unhas**, terima kasih atas arahan dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah hingga menyelesaikan studi.
5. Kakak ku **Sesy Fitriana, S.Sos**, kakak ipar **Faharuddin, A.Md**, adikku tersayang **Muh. Asril Akbar** dan keponakanku yang paling manis **Fahrezy Jusuf** yang senantiasa memberikan motivasi, semangat dan materil kepada penulis.
6. **Ronny Dg. Masikki, S.T** yang tak pernah lelah meluangkan waktu untuk memberi doa, semangat, motivasi dan keceriaan di hati penulis.
7. Bapak **Muhammad Tuwo** selaku Ketua Kelompok Tani Hutan "Padang Pobbo" di Desa Bacu-Bacu, Bapak **Kepala Dusun Amerrung**, Bapak **Kepala Dusun Ampiri**, Bapak **Kepala Desa Bacu-Bacu**, dan **Pegawai Dinas Kehutanan Barru** yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses pengambilan data.
8. Sahabat-sahabatku **Usmiyanti, Mutmainna Sri Yuliany, Ayu Antariksa, Trivena, Lidya Biringkanae**, dan **Muridah Wahyuddin** yang telah banyak membantu penulis. Rekan penelitianku **Romilia Darwis, Chairil Ansar, Habibi Hamid**. Terima kasih untuk segala bantuan, kebersamaan, canda tawa, nasehat, dukungan dan doa kalian selama ini. Kakak **Adrayanti Sabar, S.Hut., M.P.**, **Faisal Hidayat, S.Hut.** dan **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., M.P** dan

seluruh teman-teman di **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Unhas**.

9. Kawan-kawan seperjuanganku **Angkatan '07, Angkatan '08 dan Angkatan '09** yang telah banyak menyumbang saran dan pola pikir selama menyelesaikan jenjang perkuliahan dan untuk seluruh teman-teman **BEM Kehutanan UH**.

Akhir kata, kesempurnaan hanyalah milik Allah tak ada manusia tanpa kelemahan. Penulis menerima dengan lapang dada setiap nasihat dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	No.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Hutan Tanaman Rakyat	5
B. Masyarakat Kawasan Hutan	7
C. Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat	9
D. Pengembangan Usaha	12
E. Analisis Empat Bidang Pengembangan Usaha	14
F. Analisis Kebutuhan Penghidupan (Livelihood)	16
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	18
B. Metode Pengumpulan Data	18
C. Analisis Data	19
D. Defenisi Operasional	26

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak dan Luas	28
B. Keadaan Sosial Ekonomi	29
C. Kondisi Geografis.....	29
D. Mata Pencaharian	30

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unit Unit Usaha Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	
1. Identifikasi Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat	32
2. Identifikasi Unit Unit Usah Hutan Tanaman Rakyat	33
B. Analisis Keuangan Unit Rumah Tangga	
1. Analisis Pendapatan Unit Rumah Tangga	36
2. Analisis Pengeluaran Unit Rumah Tangga	38
2. Analisis Tujuan Keuangan Unit Rumah Tangga	39
C. Analisis Pengembangan Unit Usaha Hutan Tanaman Rakyat	
1. Identifikasi Produk/sumberdaya yang potensial	45
2. Identifikasi Peluang dan Hambatan	48
3. Pemilihan Unit usaha yang potensial	51
4. Perencanaan Usaha pembangunan berkelanjutan	54

VI. PENUTUP

Kesimpulan	70
Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Teks	Hal
1.	Matriks Analisis Livelihood	19
2.	Penilaian Unit Usaha	21
3.	Kriteria Pemilihan Unit Usaha	22
4.	Matriks Analisis SWOT.....	26
5.	Jumlah penduduk pembagian tingkat dusun.....	29
6.	Kondisi Geografis.....	30
7.	Mata Pencaharian Penduduk.....	30
8.	Daftar nama kelompok tani HTR... ..	32
9.	Analisis Total Pendapatan Responden.....	37
10	Analisis Pengeluaran Biaya Hidup Responden.....	38
.		
11	Analisis kebutuhan nafkah responden.....	40
.		
12	Analisis Produk/sumberdaya yang Tidak Potensial.....	45
.		
13	Penilaian terhadap peluang sumberdaya/produk.....	48
.		
14	Penilaian terhadap hambatan sumberdaya/produk.....	49
.		
15	Perbandingan Skor Unit Usaha.....	52
.		
16	Analisis SWOT untuk unit usaha kacang tanah.....	60
.		
17	Analisis SWOT Untuk Unit Usaha.....	60
.		

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks
1.	Kuisisioner Pengelola HTR
2.	Daftar Nama Responden
3.	Pendapatan Responden dari Usaha Tani
4.	Total Pendapatan Responden
5.	Analisis Kebutuhan dan Nafkah Petani (Livelihood)
6.	Tabel Penilaian
7.	Sketsa Pengelolaan HTR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditinjau dari sisi pembangunan ekonomi, eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan oleh pihak swasta yang konsesi pengelolaannya diberikan oleh pemerintah, telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi, dari sisi yang lain, pemberian konsesi HPH dan HPHH serta HTI kepada pihak Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menimbulkan bencana nasional, selain karena kerusakan sumber daya hutan akibat eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi secara konsisten selain menimbulkan kerugian ekologi (ecological cost) yang tak terhitung nilainya, ternyata menimbulkan kerusakan sosial dan budaya (social and cultural cost), termasuk pembatasan akses dan pengusuran hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas pemanfaatan sumber daya hutan di daerah.

Sebuah program baru pemerintah yang disebut Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Kawasan hutan yang dapat dicadangkan sebagai areal HTR adalah

kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak, dan diutamakan dekat dengan industri hasil hutan. Program baru HTR ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan hutan tanaman yang diharapkan dapat bermanfaat dari segi lingkungan dan kelestarian hutan sekaligus menyediakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, terutama yang bermukim di dalam dan sekitar hutan.

Pengembangan HTR lebih diarahkan kepada keterlibatan masyarakat sebagai pelaku atau mitra utama. Pengelolaan HTR bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar ikut mengelola hutan di sekitarnya melalui pengembangan usaha pengelolaan HTR yang kelembagaannya dibentuk secara kelompok.

Salah satu diantara 10 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat jatah menyediakan Hutan Tanaman Rakyat adalah Kabupaten Barru. Data statistik Kabupaten Barru hingga tahun 2011 menyebutkan luas hutan saat ini: 65.185 Ha terdiri dari Hutan Lindung: 49.801 Ha dan Hutan Produksi Terbatas: 15.384 Ha. Hutan Tanaman Rakyat yang sedang dikembangkan terletak di Desa Bacu-bacu Kecamatan Pujananting dengan luas areal Hutan Tanaman Rakyat yang akan dikembangkan adalah 270 ha.

Ditinjau dari aspek pencapaian tujuan, HTR yang akan dicadangkan di areal Desa Bacu-bacu cukup potensial untuk memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat lainnya khususnya di bidang peningkatan pendapatan masyarakat,

penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan bahan baku industri dan jasa lingkungan.

Salah satu kegiatan yang memegang peranan penting dalam pengembangan HTR adalah kegiatan perencanaan. Perencanaan memerlukan kajian yang mendalam sehingga didapatkan situasi dan kondisi yang terkini, sehingga perencanaan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran. Salah satu kajian penting yang harus dilakukan adalah analisis sumberdaya atau produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada areal HTR.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis dan pengembangan pasar terhadap komoditas-komoditas unggul dan sesuai berdasarkan hasil analisis empat bidang pengembangan usaha yaitu pasar dan ekonomi, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, sosial dan kelembagaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain perencanaan pengembangan unit usaha tersebut, perlu pula diketahui tujuan keuangan rumah tangga. Hal ini berguna untuk menentukan data konsumsi rumah tangga saat ini dan harapan ideal rumah tangga guna memenuhi kebutuhan keluarga untuk satu tahun. Pengetahuan tentang harapan ideal rumah tangga ini akan memberikan gambaran unit usaha yang dapat mereka kelola sendiri tanpa resiko berlebihan dalam jangka waktu yang panjang.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bacu-bacu Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru yang merupakan salah satu sentra pengembangan kegiatan Hutan Tanaman Rakyat.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Melakukan identifikasi terhadap kelompok sasaran dalam pengembangan sumberdaya dan produk yang potensial untuk melakukan usaha dalam areal HTR.
2. Menentukan tujuan keuangan unit rumah tangga untuk pengembangan usaha di areal HTR
3. Menganalisis sumberdaya dan produk yang potensial untuk dikembangkan pada areal HTR.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam kegiatan pengembangan usaha pada areal HTR.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hutan Tanaman Rakyat

Pengertian Hutan Tanaman Rakyat (HTR) secara historis merupakan penyempurnaan dari pola dan kelembagaan hutan tanaman yang telah ada seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat (HR) melalui KUHR, proyek, dan swadaya masyarakat (dan sistem penanaman melalui GERHAN). HTR merupakan program pengelolaan hutan intensif dari aspek teknologi, manajemen dan kelembagaan. Program HTR merupakan bentuk lembaga sama sekali baru ataupun merupakan pengembangan dari kelembagaan hutan tanaman yang berbasis masyarakat setempat seperti pola kemitraan, pola MHBM/PHBM dan MHR untuk HTI, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan komoditas kayu dan non-kayu, atau program Hutan Rakyat yang dikembangkan pada lahan-lahan milik masyarakat (Hakim, 2006:65), sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.6 Tahun 2007, defenisi HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Pendapat lain dikemukakan oleh Hakim (2006:66) yang mendefenisikan Program HTR sebagai langkah dan upaya baru pemerintah dalam memperkuat kelembagaan sektor kehutanan dimana pengelolaan kawasan hutan secara hukum diserahkan kepada masyarakat yang merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan visi

"forest for people" secara lebih serius atau pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam hal ini kawasan hutan produksi.

Menurut Peraturan Pemerintah P23/Menhut-II/2007 lokasi dan penetapan areal Hutan Tanaman Rakyat dilakukan oleh menteri kehutanan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.

Menurut Suwito dan Emilia (2007:15), Pola pengembangan HTR direncanakan mengikuti 3 pola, yaitu:

1. Pola Mandiri yaitu masyarakat setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHKHTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar dan pendamping dari pemerintah/Pemda.
2. Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S yaitu Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar.
3. Pola DeveloperBUMN/S sebagai developer membangun HTR dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit.

Lebih lanjut Permenhut Nomor: P23/Menhut-II/2007 jenis tanaman pokok HTR yang dapat dikembangkan untuk pembangunan UPHHK-HTR terdiri dari:

1. Tanaman Sejenis yaitu tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) beserta varietasnya.
2. Tanaman berbagai jenis yaitu tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau jenis lain yang ditetapkan oleh menteri.

B. Masyarakat Kawasan Hutan

Manusia senantiasa mempergunakan dan mengolah sumberdaya alam yang tersedia disekitar lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki kehidupannya. Ada beberapa hal yang membuat manusia melakukan usaha-saha atau karya yang diciptakan yang bernilai ekonomis agar dapat memenuhi kebutuhannya (Koentjaraningrat, 1990:109)

Pengertian masyarakat dalam konteks pengelolaan hutan adalah masyarakat setempat, yaitu kelompok masyarakat yang berdiam di dalam dan disekitar hutan dan berintegrasi dengan hutan sejak turun-temurun. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan bangsa maka di beberapa tempat terdapat masyarakat setempat yang telah bercampur dengan pendatang (Simpoha, 1998:12)

Sedangkan kawasan hutan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan

Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan Sutrisno (2010) berpendapat bahwa peningkatan kualitas hutan produksi dapat dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan salah satu alternatif dalam mendukung revitalisasi sektor kehutanan yang perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan (pro-growth, pro-job, pro-poor).

Masyarakat kawasan hutan (di dalam dan disekitar hutan) lebih dipahami masyarakat umum dalam berbagai istilah populer seperti : masyarakat peladang berpindah, masyarakat perambah hutan, masyarakat asli (indigenous people), masyarakat hukum adat, serta masyarakat adat dalam hutan (Rahz, 1997:13).

Hakim (2006:66) mengemukakan dalam HTR terkandung empat hal yang merupakan tanggung jawab pemerintah selama ini dalam pengelolaan hutan yang secara gradual diserahkan kepada masyarakat, oleh sebab itu masyarakat sebagai pengelola hutan produksi harus dipersiapkan baik secara ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan, manajemen dan kelembagaannya :

1. Tanggung jawab dalam menjaga dan mengamankan kawasan hutan

2. Tanggung jawab dalam mengelola kawasan hutan
3. Tanggung jawab dalam memanfaatkan kawasan hutan
4. Tanggung jawab atas keberhasilan HTR

Pembangunan HTR perlu memperhatikan jaminan ketersediaan keamanan kawasan hutan, kemampuan dan kesiapan masyarakat (iptek, manajemen, dan kelembagaan) untuk mengelola kawasan tersebut. Agar program HTR dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu adanya batasan pengertian tentang HTR dari berbagai aspek seperti aspek target yang ingin dicapai, aspek historis, aspek teknologi dan manajemen, dan aspek kelembagaan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih areal dengan program lain dan duplikasi masyarakat peserta HTR dengan program yang sudah ada.

C. Kelembagaan Hutan Tanaman Rakyat

Kebijakan dan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan amanat Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi untuk meningkatkan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta memenuhi permintaan bahan baku industri perkayuan.

Lebih lanjut Pemerintah melalui PP No.6 Tahun 2007 telah menetapkan pemberian IUPHHK-HTR agar dapat memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas

kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi guna mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari sebagaimana diamanatkan dalam UU 41/99 tentang Kehutanan.

Menurut Suwito dan Emilia (2007:15), HTR memiliki kelembagaan individual atau koperasi. Pemanfaatannya dapat dilakukan oleh masyarakat secara individual atau kelompok. HTR merupakan salah satu konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Konsep ini mengacu pada pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman. HTR memiliki prinsip-prinsip pemberdayaan antara lain:

1. Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (*people organized themselves based on their necessity*) yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat.
2. Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (*labor-intensive*) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab.
3. Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal

ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

Ketiga prinsip di atas dikonsepsikan dan diimplementasikan dalam pembangunan HTR dimana masyarakat akan menjadi "owner" IUPHHK-HT dan sebagai pelaku langsung.

Kelompok Tani HTR adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha HTR dalam rangka kesejahteraan anggotanya Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi dibentuk dalam skala usaha mikro, kecil, menengah dan diangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan (Anonim 2011).

Pembentukan Kelembagaan Masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya, dalam satu wadah kelembagaan yang disebut Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (KTHTR) serta bertanggung jawab terhadap lahan/ hutan yang dikelola baik dari segi kelestarian hasil maupun secara administrasi dan keuangan. Kelompok yang telah terbentuk disahkan oleh lembaga masyarakat adat setempat dan kepala kampung serta diketahui oleh Kepala Distrik dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Anonim, 2011).

D. Pengembangan Usaha

Menurut Helmi (2009) Sebuah rencana bisnis bisa datang secara tiba-tiba (ide) baik melalui pengamatan maupun pengalaman, bisa juga melalui perencanaan yang matang. Ide-ide sering sekali muncul dalam bentuk untuk menghasilkan suatu barang dan jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli, tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide yang lama

Peluang potensial bisnis dapat digali dengan cara (Helmi, 2009):

1. Menciptakan Produk Baru yang Berbeda. Tahapan-tahapan penting dalam pengembangan produk baru yaitu: pemunculan ide, pemilihan ide, pengembangan konsep, dan pengujian, strategi pemasaran, analisa bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, komersialisasi.
2. Mengamati Pintu Peluang. Beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, yaitu:
 - a. Produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat.
 - b. Kerugian teknik harus rendah.
 - c. Bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya.
 - d. Pesaing tidak memiliki teknologi canggih.

- e. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam memperhatikan posisi pasarnya.
 - f. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya.
3. Menganalisis Produk dan Proses Secara Mendalam
- Analisis ini penting untuk menciptakan peluang yang baik dalam menjalankan usahanya secara efektif dan efisien antara lain:
- a. Menganalisa produk dan jasa yang telah ada dan yang akan ada.
 - b. Menganalisa daerah pasar yang dapat dilayani secara menguntungkan.
 - c. Mengakses kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang maupun yang potensial dalam berbagai daerah pasar untuk dilayani.
 - d. Menganalisa kemampuan organisasi untuk melayani permintaan konsumen pada basis setelah penjualan.
 - e. Menggerakkan sumber-sumber organisasi untuk memuaskan kebutuhan konsumen.
 - f. Menganalisis struktur harga yang sesuai dengan penerimaan konsumen dan juga menyediakan pengoperasian bisnis yang aktif dalam hal keuntungan dan penghargaan pada pemilik.
4. Memperhitungkan Risiko. Dalam memperhitungkan risiko, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
- a. Menciptakan nilai untuk pelanggan.
 - b. Pilih pasar di mana anda dapat melampaui yang lain.

- c. Hadirkan target yang terus bergerak pada para pesaing dengan terus menerus meningkatkan posisi.
- d. Mendayagunakan inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya.

Lebih lanjut Helmi (2009) mengemukakan ide-ide yang telah kita realisir akan menciptakan peluang bisnis karena peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar kita dan banyak sekali macam bisnis yang bisa diraih. Namun, untuk menangkap peluang bisnis, diperlukan keberanian, kejelian dan kreativitas bisnis, dan kita harus betul-betul memahami kebutuhan masyarakat konsumen.

Konsep *forest for people* atau hutan untuk rakyat oleh menghutbun dijabarkan bahwa setiap warga negara, sesuai konstitusi, memperoleh kesempatan yang sama serta mempunyai kewajiban yang sama pula. Selanjutnya ditekankan bagaimana agar kesempatan kesempatan berusaha dibidang kehutanan lebih terbuka bagi semua pihak melalui melalui satu mekanisme persaiang sehat tetapi tetap memperhatikan pihak yang lemah serta selalu memperhatikan keberlanjutan kelestarian hutannya sendiri. Konsep hutan untuk rakyat pada dasarnya adalah kegiatan kehutanan yang melibatkan masyarakat banyak terutama didalam dan di sekitar hutan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dan guna hutan secara aktif dan dinamis tanpa mengabaikan aspek kelestarian hutan (Lahjie, 2003:52)

E. Analisis Empat Bidang Pengembangan Usaha

Menurut Lecup dan Nicholson (2006:41) analisis empat pengembangan usaha dapat digunakan untuk mengkaji produk-produk yang memiliki peluang kesuksesan terbesar menurut tujuan proses analisis pengembangan pasar.

Seperti yang dikemukakan (Mahbub dan Makarennu, 2010:28) tujuan yang dicapai adalah menentukan komoditas unggulan dan mengumpulkan informasi melalui pengembangan selanjutnya. Informasi yang dikumpulkan untuk melakukan analisis jalur pemasaran dan permintaan untuk setiap produk, memperkirakan potensi persediaannya dan melakukan identifikasi pesaing serta pelaku langsung dan tidak langsung yang terlibat dalam proses produksi, pengolahan dan perdagangannya. Adapun pengumpulan informasi yang dilakukan pada empat bidang pengembangan usaha yakni :

1. Pasar/ekonomi berupa pasokan bahan mentah, potensi pasar, persaingan (untuk mencari niche pasar), hambatan masuknya usaha (jalur pasar, kebijakan, keahlian, kebutuhan keuangan
2. Pengelolaan sumberdaya/lingkungan berupa ketersediaan (dalam hal ruang: waktu yang diperlukan untuk mencari dan memanen), lama dari menanam sampai memanen, potensi regenerasi dan dampak pemanenan terhadap kelasngungan hidup species, dampak produksi terhadap lingkungan.

3. Sosial/kelembagaan berupa manfaat tidak langsung bagi masyarakat, kontribusi terhadap penghasilan, pengalaman dengan produk, potensi menciptakan lapangan kerja.
4. Sains dan teknologi berupa kecocokan bagi anggota kelompok sasaran desa dari lokasi pengolahan dan teknologi pengolahan yang diperlukan, status prasarana, sumberdaya manusia/keterampilan dan usaha, sumberdaya manusia/jumlah.

F. Analisis Kebutuhan Penghidupan (Livelihood)

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Analisis livelihood adalah analisis kebutuhan penghidupan yang menentukan penghasilan para anggota kelompok sasaran dan menghitung tujuan keuangan rata-rata yang diharapkan akan dipenuhi oleh usaha masa depan. Untuk melakukan hal ini, tim fasilitator memilih sampel anggota kelompok sasaran dan 'Livelihood' meliputi aset maupun modal (alam, manusia, finansial, sosial dan fisik), aktifitas dimana akses atas aset dimaksud dimediasi oleh kelembagaan dan relasi sosial yang secara bersama mendikte hasil yang diperoleh oleh individu maupun keluarga (Mahbub dan Makarennu, 2010:10)

Lebih lanjut Mahbub dan Makarennu (2010:11) menjelaskan bahwa dengan merumuskan tujuan keuangan kelompok sasaran, harapan anggota kelompok akan diklarifikasi, khususnya mengenai tingkat

penghasilan yang ingin mereka capai melalui usaha tersebut. Langkah ini merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan suatu badan usaha. Dengan mengenali siapa mereka dan kemana tujuan yang mereka inginkan, para anggota kelompok sasaran akan lebih mampu memilih badan usaha yang dapat mereka kelola sendiri, tanpa resiko yang berlebihan dalam jangka panjang. Bahkan sebenarnya suatu badan usaha hanya dapat memiliki potensi pengembangan jangka panjang jika memenuhi harapan para anggota kelompok sasaran, dan jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mempertahankan kelanjutannya.

Dalam rangka menghitung tujuan keuangan, pengumpul informasi hendaknya:

1. Mengambil sampel informan dari berbagai peringkat kekayaan yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya atau dari kekayaan yang dinyatakan oleh proyek)
2. Melakukan analisis kebutuhan penghidupan, menghitung dan tujuan keuangan rata-rata.

Untuk mengembangkan gambaran tujuan keuangan para anggota kelompok sasaran, hendaknya mencakup variasi ukuran dan penghasilan rumah tangga.